

## **DISTRIBUSI DAN LOGISTIK HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS PADA PELABUHAN PERIKANAN PUGER JEMBER)**

Salmiya<sup>1</sup>, Vivid Dekanawati<sup>2\*</sup>, Ningrum Astriawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta

\*Email: vividdek@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Indonesian fishery products must be able to follow the requirements for guarantee good quality and the security the customer need to compete in the international market for distribution and logistics of fishermen's catches. This study aims to determine the distribution activity system of fishermen's catches on land in Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger and Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger and to determine the distribution of catches in Puger's port. The research method used is field research using descriptive methods. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. The results showed that the distribution activity system for fishermen's catches on land at PPP Puger and TPI Puger was divided into 3 (three) stages, starting from when the catch was landed, stored and then transported to the destination. The distribution of catches in PPP Puger shows that the most catches are distributed outside the region are 30%, the second largest distribution is to wholesale diluents, which is 29%, while distribution to cities and villages is 20%, distribution to diluents is 15%, and the lowest distribution to consumers by 6%.*

**Keywords:** *Distribution, logistics, fishing catch*

### **ABSTRAK**

Hasil perikanan Indonesia harus dapat mengikuti persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing di pasar internasional, untuk itu distribusi dan logistik hasil tangkapan nelayan harus baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem aktivitas distribusi hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger serta mengetahui distribusi hasil tangkapan di PPP Puger. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sample secara sengaja (*purposive sampling*). Hasil penelitian menunjukkan sistem aktivitas distribusi hasil tangkapan nelayan yang di daratkan di PPP Puger dan TPI Puger terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu dimulai sejak hasil tangkapan didaratkan, disimpan dan kemudian diangkut ke daerah tujuan. Distribusi hasil tangkapan di PPP Puger diperoleh hasil tangkapan paling banyak didistribusikan luar daerah yaitu sebesar 30%, distribusi terbesar kedua yaitu ke pengencer grosir yaitu sebesar 29%, sedangkan distribusi ke kota dan desa sebesar 20%, Distribusi ke pengencer sebesar 15%, dan distribusi terendah langsung dibagikan ke konsumen sebesar 6%.

**Kata kunci:** Distribusi, logistik, penangkapan ikan

### **PENDAHULUAN**

Hasil perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan (Abidin et al., 2017). Untuk mewujudkan peranan tersebut, hasil perikanan Indonesia harus dapat mengikuti persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing di pasar internasional yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi dan sekaligus pemasaran hasil perikanan (Husni & Putra, 2018). Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, tentang perikanan dijelaskan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

---

mengawetkannya. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan. bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Lubis, 2019).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian dalam Utami (Peraturan Menteri Perikanan, 2006) pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat baik di lihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya, pelabuhan perikanan sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pengembangan ekonomi perikanan tersebut hendaknya ditunjang oleh industri perikanan baik hulu maupun hilir dan pengembangan sumber daya manusia khususnya masyarakat nelayan (Liyani, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), dan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 41, fungsi dan peran Pelabuhan Perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusikan. Lubis memberikan pendapatnya bahwa fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan kepentingan, sebagai berikut: 1) fungsi maritim (tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal), 2) fungsi komersial (menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan), dan 3) fungsi jasa (jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan) (Lubis, 2000). Fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran (Lubis, 2011). Untuk itu diperlukan sarana untuk meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran ikan. Dengan tersedianya sarana tersebut maka pelabuhan perikanan dapat merupakan tempat pemusatan kegiatan masyarakat, hal ini terlihat dari fungsi pelabuhan perikanan, yaitu: 1) Bidang produksi, yaitu bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan melaut sampai membongkar hasil tangkapannya. 2) Bidang pengolahan, yaitu bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya. 3) Bidang pemasaran, yaitu bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapannya.

Pelabuhan Perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Jamal, 2021). Sedangkan menurut pendapat Lubis peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas, antara lain: 1) pusat aktivitas produksi, 2) pusat aktivitas distribusi, dan 3) pusat kegiatan masyarakat nelayan (Lubis, 2000). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006, klasifikasi besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut:

1. Tipe A (Samudera), Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas.

2. Tipe B (Nusantara), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.
3. Tipe C (Pantai), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
4. Tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.

Pelabuhan perikanan juga berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan mekanisme pasar yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun bagi pedagang. Dengan demikian maka sistem pemasaran dari tempat pelelangan ikan ke konsumen harus diorganisir secara baik dan teratur. Pelelangan ikan adalah kegiatan awal dari pemasaran ikan di pelabuhan perikanan untuk mendapatkan harga yang layak khususnya bagi nelayan (Lubis et al., 2012). Proses pemasaran berawal dari ikan-ikan yang telah didaratkan dibawa ke gedung pelelangan ikan untuk dicatat jumlah dan jenisnya. Setelah itu ikan disortir dan diletakkan pada keranjang atau basket plastik, selanjutnya dilaksanakan pelelangan dan dicatat hasil transaksinya. Penelitian ini dilaksanakan di PPP Puger dan di TPI Puger. Fasilitas pokok yang terdapat di PPP Puger terdiri atas lahan, dermaga, kolam pelabuhan, drainase. Fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), instalasi air bersih, instalasi listrik pabrik Es, genset, cold storage dan gedung pengepakan termasuk semua fasilitas yang menunjang aktivitas atau memberi kemudahan bagi pelaku dunia usaha (Nelayan, Pedagang, Pengolah), misalnya Balai pertemuan nelayan, Musholla, Pos jaga, Kios nelayan dan MCK umum,

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger adalah tempat mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendistribusikan hasil tangkapan, hal ini terlihat dari aktivitas penting yang dilakukan mulai dari penanganan hasil tangkapan, penyimpanan (*warehousing*) hasil tangkapan, pengangkutan hasil tangkapan, pengawasan pencatatan (*inventory control*) dan informasi pasar. Hasil tangkapan mudah busuk maka diperlukan aktivitas distribusi hasil tangkapan di PPP Puger dan TPI Puger yang cepat dan terorganisir, aktivitas distribusi yang penting antara lain penanganan hasil tangkapan, sarana penunjang aktivitas distribusi hasil tangkapan dan jalur distribusi hasil tangkapan. Agar aktivitas distribusi berjalan dengan lancar maka pendaratan dan penyimpanan hasil tangkapan harus sangat diperhatikan agar tetap terjaga mutu dari hasil tangkapan ikan. Keragaman aktivitas yang terjadi dalam proses pendistribusian hasil tangkapan di PPP Puger dan TPI Puger, dapat menggambarkan baik atau buruknya aktivitas yang dilakukan terhadap hasil akhir yang diharapkan yaitu mutu dari hasil tangkapan itu sendiri. Selain itu, penelitian yang sejenis belum pernah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger kabupaten Jember Selatan, maka perlu dilakukan suatu penelitian mengenai Distribusi Hasil Tangkapan Nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger dan Tempat pelelangan ikan (TPI) Puger Kabupaten Jember Selatan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sistem aktivitas distribusi hasil tangkapan nelayan yang di daratkan di PPP Puger dan TPI Puger serta mengetahui distribusi hasil tangkapan di PPP Puger.

## METODE

Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif (Burgess, 2002). Penggunaan survei dalam metode penelitian dengan melibatkan sejumlah responden yang merupakan *stakeholder* adalah praktisi yang banyak memiliki banyak informasi yang terkait. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sample secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu menetapkan orang-orang yang memahami atau menguasai masalah yang diteliti (Campbell et al., 2020). Data yang langsung didapat dari lapangan dengan cara pengamatan langsung wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada responden secara individu/responden yang berkaitan dengan pola sistem produksi, sistem distribusi dan daerah distribusi yang dituju.

Berdasarkan penelitian ini jumlah responden dalam penelitian ini adalah 20 orang sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 1. Responden Penelitian

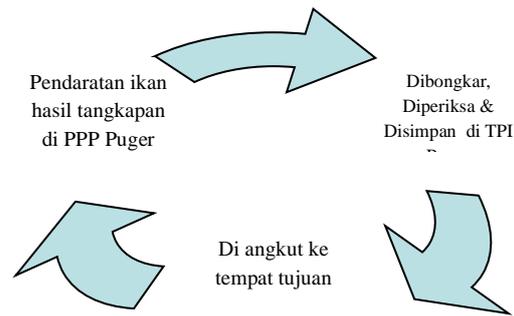
No	Sumber Data	Informasi	Jumlah Responden
1	Petugas PPP Puger dan TPI Puger	1. Jumlah ikan yang didistribusikan di PPP Puger	5 Orang
2	Nelayan PPP Puger dan TPI Puger	1. Daerah distribusi yang dituju	5 orang
3	Pengusaha ikan	2. Jenis Ikan yang didistribusikan	2 orang
		1. Jumlah ikan yang didistribusikan per bulan	
		2. Jumlah nilai (dalam Rupiah) ikan yang didistribusikan per bulan	
4	Pedagang ikan di PPP dan TPI Puger	1. Jumlah produksi ikan yang didistribusikan	8 orang
		2. Jenis ikan yang didistribusikan	
Jumlah Keseluruhan			20 orang

Tabel 2. Data Sekunder

No	Sumber Data	Informasi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa timur	1. Jumlah produksi, nilai produksi dan jenis yang didaratkan di PPP Puger tahun 2017 - 2019
2	UPT. PPP Kec. Puger Kab. Jember	1. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan tahun 2017 – 2019 2. Jumlah armada kapal penangkapan ikan Kabupaten Jember tahun 2017 -2019 3. Jumlah Nelayan Kabupaten Jember tahun 2017 - 2019
3	Bappeda Kabupaten Jember	1. Peta Kabupaten Jember

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nelayan yang berbasis di PPP Puger dan TPI Puger memiliki cara tersendiri dalam menangani hasil tangkapan di atas kapal. Saat hasil tangkapan berada di atas kapal, nelayan memberikan perlakuan khusus terhadap hasil tangkapannya. Nelayan Tuna, Tongkol, Tengiri dan Cakalang biasanya secepat mungkin memastikan dicuci bersih dan selanjutnya nelayan melakukan pernyotiran / greeding terhadap ikan tangkapan berdasarkan jenis ikan selanjutnya ikan tersebut dimasukkan kedalam palkah yang sudah di isi es curah atau es balok. Penanganan hasil tangkapan di PPP Puger terhadap hasil tangkapan yang didaratkan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. Dimulai sejak hasil tangkapan di daratkan, di simpan dan kemudian diangkut ke daerah tujuan. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan harus dalam rantai dingin untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mengalami *Rigor mortis* (kekakuan/kejang) yang menyebabkan penurunan kualitas hasil tangkapan. *Rigor mortis* adalah kekakuan yang terjadi secara bertahap sesuai dengan lamanya waktu pasca kematian hingga 24 jam setelahnya.



Gambar 1. Skema Distribusi Logistik Hasil Tangkapan Nelayan PPP dan TPI Puger

Berdasarkan hasil tangkapan masih berada diatas *deck* kapal nelayan, dilakukan penyortiran sesuai dengan jenis, ukuran dan mutunya kemudian ditempatkan di keranjang yang berbeda untuk mempermudah pelelangan dan penimbangan. Setelah kapal tiba, maka nelayan melakukan pendaratan atau penurunan hasil tangkapan dimulai dengan membongkar hasil tangkapan dari palka kapal sampai ikan diangkut ke pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan lainnya. Pada saat kapal mendarat di PPP Puger dan TPI Puger para awak kapal melakukan pembongkaran hasil tangkapan dan mendaratkan hasil tangkapannya.

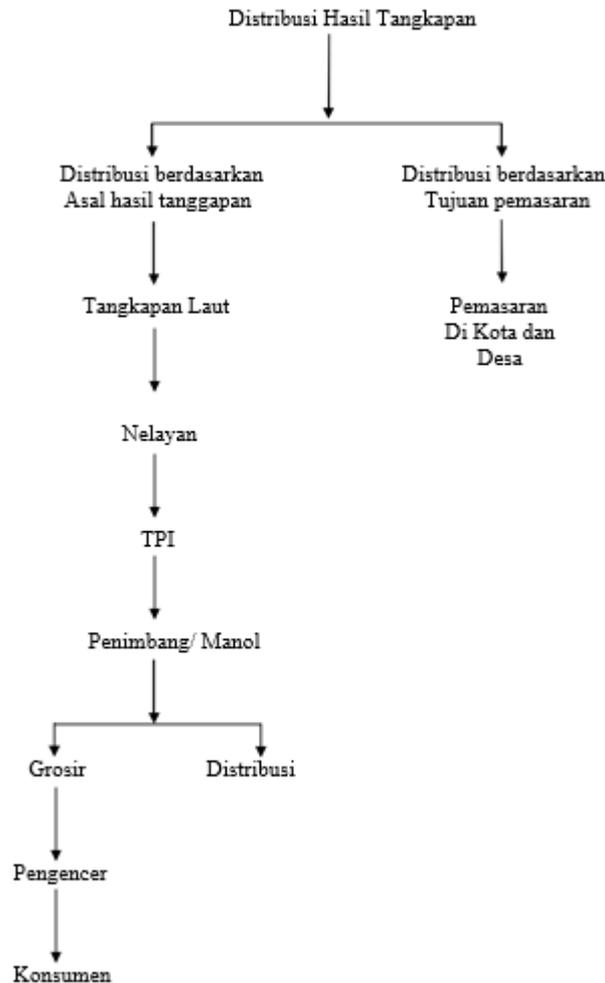
Sedangkan Proses penyimpanan yang dilakukan di PPP Puger adalah penyimpanan ikan yang diletakkan di dalam *Cold Storage*, Kulkas dan Fiber. Berhubung *Cold Storage* dan kulkas mengalami kerusakan selama 3 hari serta belum adanya perbaikan maka ikan disimpan kedalam fiber dengan ukuran fiber 80x1 meter. Lama penyimpanan ikan lebih kurang sampai 3 hari atau lebih tergantung kondisi banyak tidaknya peminat pembeli ikan. Agar ikan tetap segar maka dilakukan pemberian es batu di atas tubuh ikan, es batu dibeli langsung ke pabrik es. Sebelum hasil tangkapan diperoleh palkah kapal dijadikan tempat penyimpanan es sejak dilakukan persiapan perbekalan. Es dapat dibeli di industri rumahan yang membuat batu-batu es dalam skala besar. Setelah didapatkan hasil ikan di laut, maka ikan disimpan di dalam palkah yang diberi es. Saat tibanya di darat maka ikan langsung dilelang ke pedagang enceran. Dari pedagang enceran membawa ikan tersebut kepasar tradisional untuk dijual ke konsumen. Apabila ikan hasil lelangan tidak habis dibeli oleh pedagang enceran maka ikan langsung dimasukan ke dalam fiber yang diberi es. Tujuannya untuk dapat menjaga kesegaran ikan agar tidak mengalami proses pembusukan yang lebih cepat.

Sementara Pengangkutan hasil tangkapan di PPP Puger dan TPI Puger yaitu pengangkutan melalui darat. Pengangkutan ini dikelola oleh pihak swasta. Alat transportasi darat yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan berupa mobil *pick up/colt (L300 dan Carry)*. Transportasi darat berupa mobil *pick up* rata-rata mampu membawa muatan mencapai 2,7 Ton. Pasar yang menjadi daerah tujuan pendistribusian hasil tangkapan nelayan terbagi menjadi pasar antar Kabupaten yang meliputi daerah (Banyuwangi (Muncar), Rembang (Jepara), Probolinggo (Mayangan) & Pasuruan). Pasar lokal yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya menerima pasokan hasil tangkapan dari beberapa pelabuhan diantaranya TPI Puger, dan TPI Getem. Hasil tangkapan berupa ikan segar yang dominan dijual berupa tongkol, cakalang, tuna, kembung, cumi-cumi dan udang.

Kelima komoditi perikanan ini dijual hampir seragam di setiap pedagang yang ada di pasar tradisional di Jember, disamping pengangkutan dengan kendaraan roda 4 (empat) pada pengangkutan darat juga menggunakan roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan roda 3 (tiga) seperti becak untuk mengantarkan hasil tangkapan perikanan yang dibawa kebeberapa wilayah sekitar dalam Kabupaten Jember. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumsi ikan di Kabupaten Jember menyebabkan peningkatan permintaan produk ikan laut. Untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh maka masyarakat dapat membeli ikan di pasar tradisional.

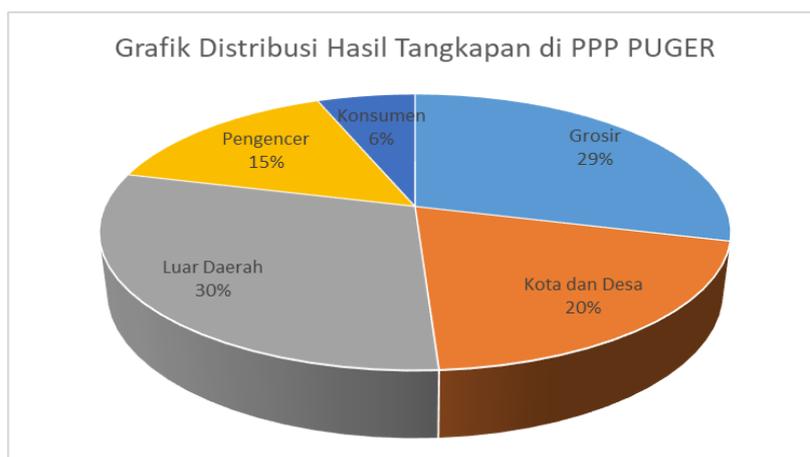
Hasil penelusuran dari *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas distribusi hasil tangkapan di PPP Puger dan TPI Puger menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tidak tersentuh dan masih berfungsi dalam keadaan tidak memadai atau kurang optimal. Hasil dari

penelusuran terhadap *Stakeholder* dan masyarakat menyatakan bahwa permasalahan dari fasilitas distribusi hasil tangkapan di PPP Puger dan TPI Puger dalam kegiatan distribusi hasil tangkapan memerlukan fasilitas yang memadai baik pada saat pra dan pasca, pada saat pra distribusi bisa kita perhatikan aktifitas untuk penjagaan mutu masih kurang hal ini terlihat dari penanganan panen yang masih banyak kekurangan karena hanya mengandalkan *fiber* untuk menyimpan hasil tangkapan tersebut. Adapun jalur distribusi hasil tangkapan yang dilakukan di Puger dapat dilihat pada gambar



Gambar 2. Jalur distribusi hasil tangkapan yang dilakukan di PPP Puger

Informasi pasar berfungsi sebagai penyeimbangan permintaan dan penawaran untuk menghindari fluktuasi harga akibat kelebihan komoditi di pasar. Kegunaan informasi pasar bagi nelayan adalah sebagai pertimbangan dalam melakukan operasi penangkapan ikan tentang jenis dan jumlah ikan dibutuhkan dan harga jual di pasar. Walaupun harganya disesuaikan melalui proses pelelangan, akan tetapi untuk informasi pasar di PPP Puger, Jember dan TPI Puger masih sangat rendah pengaktifnya dimana untuk informasi tersebut masih susah untuk kita lihat di papan informasi yang ada. Hasil tangkapan yang didistribusikan di lokal maupun ke beberapa daerah harus memenuhi standar kualitas sesuai dengan permintaan konsumen dan standar mutu. Uji mutu dilakukan untuk produk-produk hasil tangkapan dalam keadaan segar maupun produk-produk olahan. Produk-produk hasil tangkapan yang di distribusi ke daerah-daerah biasanya dalam bentuk ber es dan segar. Sehingga kualitas ikan yang tersedia di Kabupaten Jember akan selalu mempunyai brand tersendiri dan efeknya ikan yang akan dikeluarkan ke daerah dan provinsi lain akan terjaga mutu dan kuantitasnya. Adapun distribusi hasil tangkapan yang di lakukan:



Gambar 3. hasil tangkapan yang dilakukan di PPP Puger

Dari gambar 3 diperoleh bahwa grafik distribusi hasil tangkapan di PPP Puger diperoleh distribusi hasil tangkapan paling banyak adalah ke luar daerah yaitu sebesar 30%, distribusi terbesar kedua yaitu ke pengencer grosir yaitu sebesar 29%, sedangkan distribusi ke kota dan desa sebesar 20%, Distribusi ke pengencer sebesar 15%, dan distribusi terendah langsung dibagikan ke konsumen sebesar 6%. Harga produk hasil tangkapan nelayan yang di jual dalam lokal dan kedaerah-daerah lainya bervariasi sesuai dengan pasar dan daerahnya. Data harga ini diambil oleh peneliti pada tahun 2021. Harga dasar dalam penjualan hasil tangkapan kepasar lokal dan daerah lainnya merupakan harga ikan hasil pelelangan kemudian harga akan disesuaikan dengan biaya lainya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer. Harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan PPP Puger untuk ikan Cakalang Rp19.400. ,Tongkol Rp 13.478., Layur Rp 37.714. , Lemuru Rp 6.650. Slengseng Rp 20.000. Cumi-cumi Rp 47.500., Layang Benggol Rp 9.000. Ketentuan harga di beberapa daerah sangat di pengaruhi oleh kualitas produk perikanan. Semakin baik kualitasnya maka semakin tinggi harganya. Hingga saat ini pasar di daerah luar Kabupaten Jember merupakan pasar yang paling tinggi dalam memberikan harga per jenis produk perikanan dibandingkan dengan daerah lokal. Harga ini juga sebanding dengan penanganan dan pengujian mutu yang harus dilakukan untuk menjaga agar produk perikanan tersebut dalam keadaan baik dan layak konsumsi

## KESIMPULAN

Distribusi dan logistik hasil tangkapan ikan secara tradisional oleh nelayan tradisional di pelabuhan perikanan Puger Jember berlangsung dalam beberapa tahapan dimulai dari pendistribusian hasil tangkapan ke TPI Puger, sampai *delivery* ke tangan konsumen. Proses kegiatan di TPI sendiri dimulai dari hasil tangkapan di daratkan, kemudian penyortiran, mengawetkan ikan dengan menggunakan es, sampai pada pendistribusian ke tangan konsumen baik secara langsung bisa dibeli ditempat ataupun melalui pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan TPI Puger. Kegiatan di TPI ini mendukung pemenuhan logistik ekonomi nasional dan menjamin keberlanjutan rantai pasokan hasil tangkapan nelayan itu sendiri. Distribusi hasil tangkapan di PPP Puger diperoleh distribusi hasil tangkapan paling banyak adalah ke luar daerah yaitu sebesar 30%, distribusi terbesar kedua yaitu ke pengencer grosir yaitu sebesar 29%, sedangkan distribusi ke kota dan desa sebesar 20%, Distribusi ke pengencer sebesar 15%, dan distribusi terendah langsung dibagikan ke konsumen sebesar 6%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Harahab, N., & Asmarawati, L. (2017). *Pemasaran Hasil Perikanan*. Universitas Brawijaya Press.
- Burgess, R. G. (2002). *In the field: An introduction to field research*. Routledge.

- 
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.
- Husni, A., & Putra, M. G. S. M. P. (2018). *Pengendalian mutu hasil perikanan*. Ugm Press.
- Jamal, N. U. (2021). *Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Liyani, H. (2022). *PERAN PABBALOLANG SEBAGAI SALAH SATU KELEMBAGAAN TATANIAGA HASIL PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS DI TPI PAOTERE KOTA MAKASSAR)*. Universitas Hasanuddin.
- Lubis, E. (2000). Pengantar Pelabuhan Perikanan. *Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor*.
- Lubis, E. (2011). Kajian peran strategis pelabuhan perikanan terhadap pengembangan perikanan laut. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 5(2).
- Lubis, E. (2019). *Pelabuhan perikanan*. PT Penerbit IPB Press.
- Lubis, E., Pane, A. B., Muninggar, R., & Hamzah, A. (2012). Besaran kerugian nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. *Maspri Journal: Marine Science Research*, 4(2), 159–167.
- Peraturan Menteri Perikanan. (2006). PER.16/MEN/2006. *Tentang Usaha Perikanan Tangkap*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. (2004).
- Utami, R. (2020). *PERAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. UU No. 45 tahun 2009*. (2009). <https://doi.org/10.1038/132817a0>